



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 41 Tahun 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
12. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.

13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan di wilayah Kota Semarang yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan Organik di dalam negeri.
15. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota yang selanjutnya disingkat KP3 Kota adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2013.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan produsen.

Pasal 6

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pupuk Urea = Rp. 1.800,-/kg
 - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000,-/kg
 - c. pupuk ZA = Rp. 1.400,-/kg
 - d. pupuk NPK = Rp. 2.300,-/kg
 - e. pupuk Organik = Rp. 500,-/kg
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) KP3 Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.

- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

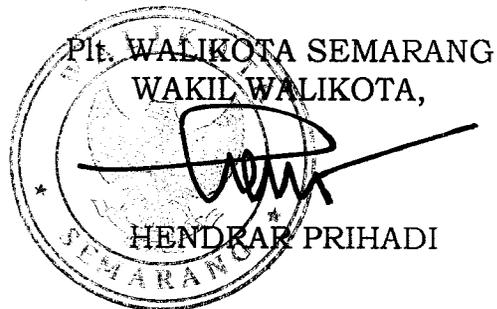
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

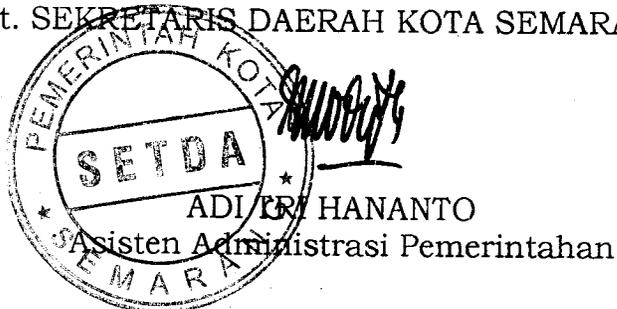
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 41

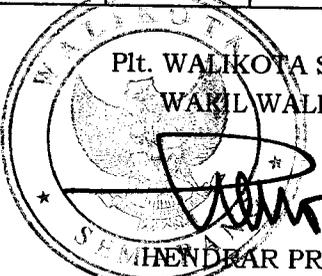
LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 41 Tahun 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2013

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pembudidaya Ikan dan/atau Udang
 JENIS PUPUK : Urea

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHA N	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	670,00	78,00	70,00	51,50	58,00	72,50	59,00	32,00	28,50	31,00	43,50	68,00	78,00	670,00
2	Gunungpati	736,00	75,50	70,00	55,00	63,50	80,50	62,50	55,00	49,50	29,50	61,00	59,00	75,00	736,00
3	Banyumanik	97,50	11,00	11,00	8,00	5,00	8,00	9,50	2,00	10,50	2,00	12,50	6,00	12,00	97,50
4	Tembalang	248,00	25,50	25,00	47,00	24,50	12,00	2,00	6,50	8,50	2,00	16,50	48,50	30,00	248,00
5	Pedurungan	108,50	9,00	8,00	23,00	10,00	15,00	4,50	3,00	4,00	4,00	8,00	10,00	10,00	108,50
6	Genuk	313,50	30,50	10,00	21,50	26,00	20,50	14,50	39,50	18,00	24,00	33,00	41,00	35,00	313,50
7	Semarang Barat	36,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	36,00
8	Ngaliyan	232,00	26,50	20,50	12,50	19,00	30,50	22,50	8,00	12,50	12,50	17,50	24,00	26,00	232,00
9	Tugu	258,50	23,00	38,00	22,50	15,00	8,50	34,00	40,00	18,50	9,00	10,00	15,00	25,00	258,50
	Jumlah	2.700,00	285,00	254,50	243,00	223,00	249,50	210,50	188,00	152,00	116,00	204,00	277,50	297,00	2.700,00


 PIt. WALIKOTA SEMARANG
 WAKIL WALIKOTA,

 HENDRAR PRIHADI

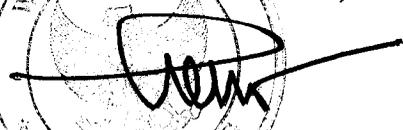
LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 41 Tahun 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2013

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
 JENIS PUPUK : SP-36

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	85,00	9,00	9,00	8,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	8,00	9,00	9,00	85,00
2	Gunungpati	78,00	8,00	8,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00	9,00	9,00	78,00
3	Banyumanik	33,00	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	33,00
4	Tembalang	52,00	6,00	5,00	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	6,00	52,00
5	Pedurungan	16,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	16,00
6	Genuk	55,00	6,00	6,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	55,00
7	Semarang Barat	13,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	13,00
8	Ngaliyan	49,00	6,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	6,00	49,00
9	Tugu	69,00	8,00	7,00	7,00	6,00	4,00	3,00	3,00	4,00	5,00	7,00	7,00	8,00	69,00
	Jumlah	450,00	51,00	47,00	41,00	36,00	26,00	26,00	25,00	26,00	31,00	41,00	48,00	52,00	450,00

PL. WALIKOTA SEMARANG
 WAKIL WAKOTA,

 HENDRAR PRIHADI

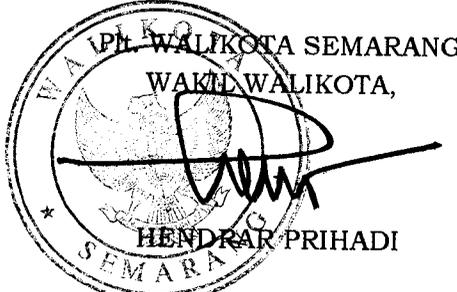
LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 41 Tahun 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2013

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
 JENIS PUPUK : ZA

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	33,00	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	33,00
2	Gunungpati	30,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	30,00
3	Banyumanik	17,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	17,00
4	Tembalang	22,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	22,00
5	Pedurungan	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	-	0,50	1,00	1,00	10,00
6	Genuk	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	2,50	20,00
7	Semarang Barat	5,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	5,00
8	Ngaliyan	16,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00
9	Tugu	22,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	22,00
	Jumlah	175,00	19,00	17,00	17,50	14,50	14,50	13,50	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	17,00	175,00


 WAKIL WALIKOTA SEMARANG
 WAKIL WALIKOTA,
 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 41 Tahun 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2013

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan
 JENIS PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN (Satuan ton)												KET	
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Mijen	225,00	20,00	22,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00	14,00	15,00	18,00	18,00	225,00
2	Gunungpati	240,00	24,00	24,00	24,00	20,00	20,00	18,00	18,00	17,00	17,00	18,00	20,00	20,00	240,00	
3	Banyumanik	60,00	8,00	8,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	6,00	6,00	8,00	60,00	
4	Tembalang	120,00	14,00	14,00	12,00	12,00	10,00	8,00	6,00	6,00	6,00	8,00	12,00	12,00	120,00	
5	Pedurungan	37,00	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	37,00	
6	Genuk	132,00	15,00	15,00	15,00	15,00	8,00	6,00	6,00	8,00	8,00	9,00	12,00	15,00	132,00	
7	Semarang Barat	27,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	27,00	
8	Ngaliyan	115,00	9,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	115,00	
9	Tugu	124,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	124,00	
	Jumlah	1.080,00	107,00	110,00	107,00	101,00	89,00	83,00	74,00	73,00	71,00	77,00	91,00	97,00	1.080,00	

Pt. WALIKOTA SEMARANG
 WAKIL WALIKOTA,

 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 41 Tahun 2012
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2013

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura
 JENIS PUPUK : Organik

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	16,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00
2	Gunungpati	22,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	22,00
3	Banyumanik	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4	Tembalang	7,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00
5	Pedurungan	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00
6	Genuk	12,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	12,00
7	Semarang Barat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00
8	Ngaliyan	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
9	Tugu	10,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	10,00
	Jumlah	75,00	11,00	6,00	4,00	4,00	4,00	11,00	6,00	3,00	2,00	4,00	6,00	14,00	75,00


 PE. WALIKOTA SEMARANG
 WAKIL WALIKOTA,

 HENDRAR PRIHADI